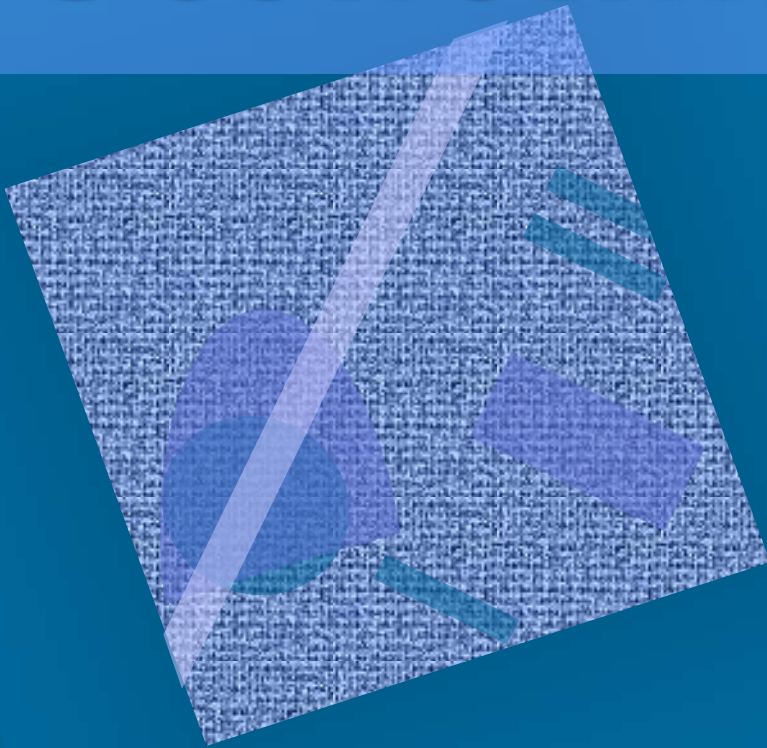


Otonomi Daerah



UU No. 32/2004: Sistim Keuangan Pusat-Daerah

- Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - PAD: pajak dan retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah
 - Pajak pusat utk daerah: pajak RT, kendaraan bermotor, jalan, potong hewan, kopra dan pajak pembangunan
- Hasil Pemungutan Pajak Negara diserahkan daerah:
 - Pajak tertentu: pajak peralihan, upah, materai, kekayaan dan perseroan
 - Bea masuk & keluar dan cukai
- Ganjaran, subsidi dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu

Revisi UU No. 32/2004 ttg Bagi hasil pajak, ganjaran, dan bantuan

- Penyerahan tambahan pajak negara kepada daerah: Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak radio dan bangsa asing
- Subsidi Daerah Otonom (SDO) diberikan sebagai ganti dari bagi hasil pajak
- Program Bantuan Inpres sebagai ganti ganjaran dan subsidi sejak 1969
- Pinjaman kepada Daerah: IPEDA (1969), Inpres Pasar (1976) dan pinjaman lainnya (1978)

Otonomi Daerah dalam Struktur Sentralisasi

Prinsip-prinsip UU No. 5/1974: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

1. Desentralisasi – penyerahan urusan pemerintahan secara hirahis
2. Dekonsentrasi – pelimpahan wewenang dari pemerintah/kepala wilayah/kepala instansi kepada pejabat daerah
3. Tugas Pembantuan – koordinasi prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi

Otonomi Daerah dalam Struktur Sentralisasi

Dampak UU No. 5/1974:

- Sentralisasi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan
- Ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat
- Ketergantungan dalam aspek keuangan dan keleluasaan dalam pengambilan keputusan

Prinsip Sistim Keuangan Pusat-Daerah berdasrkan UU No. 5/1974

1. Urusan Tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari APBN
2. Urusan Tugas Pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari APBD
3. Ursan Tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dalam rangka tugas perbantuan dibiyai APBN atau APBD
4. Pemerintah pusat memberikan bantuan sepanjang sumber keuangan daerah belum mencukupi

Penyebab Ketergantungan Fiskal

- Rendahnya PAD karena:
 - Perusahaan Daerah kurang berperan sebagai sumber pendaptan daerah
 - Sentralisasi dalam bidang perpajakan
 - Pajak daerah kurang bererana sbg sumber pendaptan daerah
 - Unsur Politis
 - Kelemahan pemberian subsidi dari pusat ke daerah

Penyebab Ketergantungan Fiskal

- Dominannya Transfer dari Pusat melalui jalur:
 1. Subsidi Daerah Otonom (SDO)
 2. Program Inpres dari dana Non-DIP
 3. DIP untuk pengeluaran sektoral dialokasikan untuk membiayai proyek pembangunan sebagai perwujudan mekanisme dekonsentrasi

Gambar 23.4. Isu Sentral dalam Era Otonomi Daerah



Dasar Reformasi Otonomi Daerah

- Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang:
 - penyelenggaraan otonomi daerah
 - Pembagian dan Pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan
 - Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah dalam kerangka NKRI
- UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah
- UU No. 25/1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

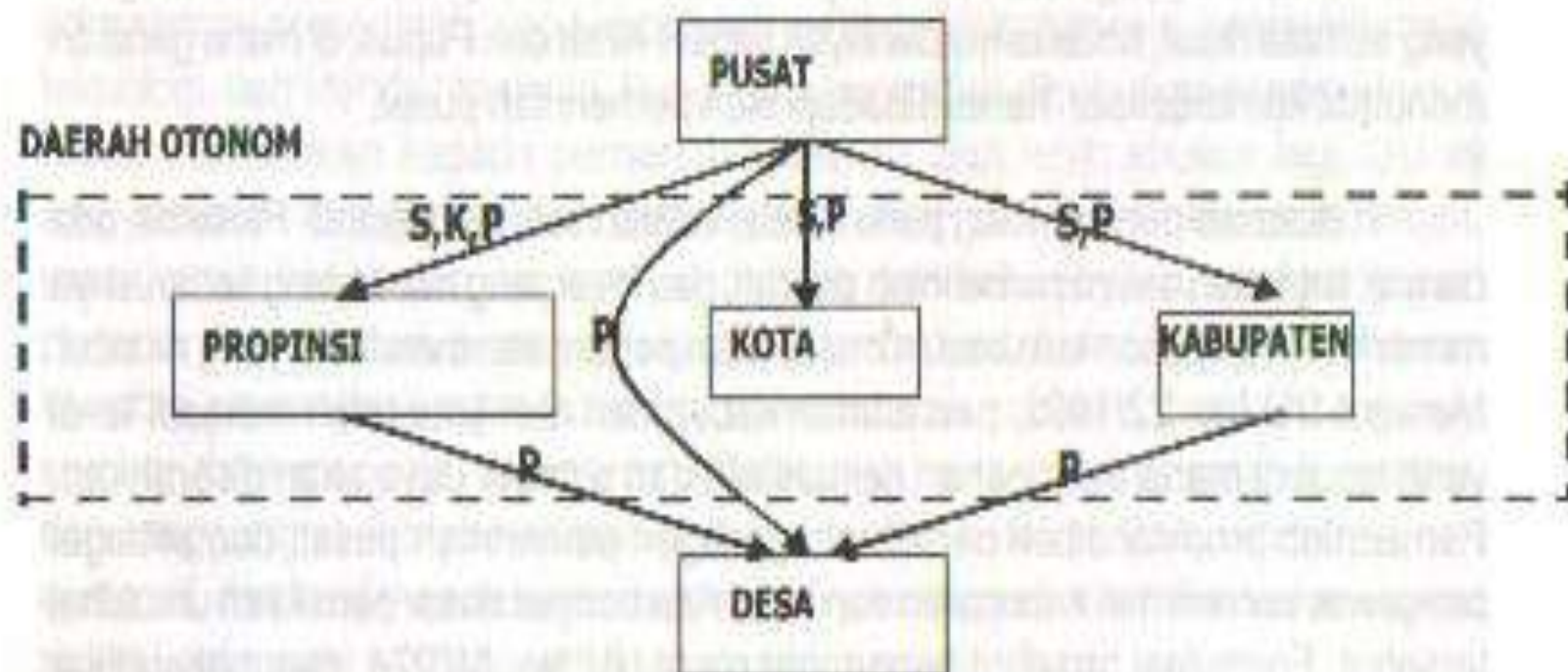
UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

- Pengembangan otonomi pada tingkat Kabupaten dan kota dengan memperhatikan keaneka-ragaman daerah
- Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional
- Memberikan otonomi secara utuh kepada kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakasa dan aspirasi masyarakat/DRPD

UU No. 25/1999 tentang perimbangan Keuangan

- Meningkatkan Keleluasaan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU)
- Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral kepada regional
- Meningkatkan bagian daerah bagi daerah penghasil devisa
- DAU didasarkan potensi dan kebutuhan daerah
- Penggunaan mekanisme check and balance

Gambar 23.1. Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia



S : Desentralisasi (Penyerahan
 K : Dekonsentrasi (Pelimpahan
 P : Tugas Pembantuan

W) → APBD
 W) }
 - " SENTRALISASI"
 - Dari APBN

Sumber Dana Perimbangan

- Bagian daerah dari penerimaan PPh orang pribadi, PBB, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)

Gambar 23.2. Skema DAU 2002



Gambar 23.3. Proses Formula DAU



Sumber: Brodjonegoro (2002)

- Maturnuwun..